

2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY

Jalan Kusumanegara 9 Yogyakarta
Telp. : (0274) 512063; Fax : (0274) 581335
Surel : program_indagkop@yahoo.co.id
Laman : disperindag.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 – 2027. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 13 Februari 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DIY



Yuna Pancawati, SE., M.Si.

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Terwujudnya daya saing sektor industri” :
 - Diukur dengan indikator kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) sasaran, yakni meningkatnya industri pengolahan, serta meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah.
 - Target capaian indikator tujuan perangkat daerah tahun 2024 sebesar 12,15% sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 11,86%. Dengan demikian capaian ini masih di bawah target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 97,59%.
 - Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,04% dengan nilai sebesar 487.321 juta rupiah.
2. Capaian tujuan “Terwujudnya daya saing sektor perdagangan” :
 - Diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB DIY
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
 - Target capaian indikator tujuan perangkat daerah tahun 2024 sebesar 8,39% sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 8,04%. Dengan demikian capaian ini masih di bawah target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 95,83%.
 - Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB DIY tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,13% dengan selisih sebesar 360.507 juta rupiah.
3. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri”.
 - Diukur dengan indikator Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program

Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 5,32%; dengan nilai realisasi sebesar 3,94%. Dengan demikian capaian ini masih dibawah target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi terhadap target mencapai 74,06%.
- Dibandingkan dengan realisasi laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,35%

4. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya industri pengolahan”.

- Diukur dengan indikator Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) program, yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 2,50%; dengan nilai realisasi sebesar 3,63%. Dengan demikian capaian ini sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi terhadap target mencapai 145,20%.
- Dibandingkan dengan realisasi laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,63%

5. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”.

- Diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 adalah nilai A, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi hasil penilaian RB dengan nilai A. Dengan demikian capaian ini telah sesuai dengqn target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%

- Dibandingkan capaian indikator sasaran tahun 2023, persentase realisasi sama dengan tahun 2023.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Ekspor produk kayu ke negara tujuan utama ekspor DIY, terutama di Uni Eropa, terkendala oleh pemberlakuan regulasi anti deforestasi (*Europe Union Deforestation Regulation/EUDR*).
2. Maraknya produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah.
3. Menurunnya daya beli masyarakat baik Indonesia maupun di negara tujuan ekspor.
4. Mahalnya harga transportasi pengiriman/logistik terutama ke eropa karena tidak bisa melewati laut merah.
5. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut menyebabkan naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal ini menyebabkan mahalnya harga bahan baku impor. Imbasnya terhadap para pelaku usaha industri yang menggunakan bahan baku impor kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.
6. Pemanfaatan teknologi produksi yang masih perlu ditingkatkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	6
BAB I Pendahuluan	9
1.1. <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	9
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.3. Isu-Isu Strategis	13
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	14
1.5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023	17
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	19
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	19
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	22
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	35
BAB III Akuntabilitas Kinerja	39
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	39
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	75
3.3. Efisiensi Anggaran	83
3.4. Inovasi	84
3.5. Lintas Sektor	85
BAB IV Penutup	91
4.1. Kesimpulan	91
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	93
LAMP I R A N	95

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	14
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	15
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024	16
Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	17
Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2022-2027	20
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
Tabel II.3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	22
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024	30
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024	30
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024	32
Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024	32
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	39
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	39
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Tujuan 1	40
Tabel III.4 Distribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	41
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan 1	41
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	42
Tabel III.7 Laju Pertumbuhan Berdasarkan Lapangan Usaha	42
Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	43
Tabel III.9 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1	44
Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Tujuan 2	53
Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan 2	53
Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2	54
Tabel III.13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	55
Tabel III.14 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	56
Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3	70
Tabel III.16 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3	70
Tabel III.17 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3	71
Tabel III.18 Kontribusi Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian TPB/SDGs Pemerintah Daerah.....	76
Tabel III.19 Kontribusi Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	78
Tabel III.20 Kontribusi Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah	80
Tabel III.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024	83
Tabel III.22 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.....	86

Daftar Gambar

Gambar I.1 Cascading kinerja	10
Gambar I.2 Struktur organisasi	11
Gambar I.3 Tugas, fungsi dan peta jabatan pada organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	13
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, monitoring dan evaluasi, E-SAKIP	35
Gambar II.2. Aplikasi JBSC	36
Gambar II.3. Aplikasi SIKONCER	36
Gambar II.4. Aplikasi Jogjaplaza	37
Gambar II.5. Aplikasi SIMAMAK	37
Gambar II.6. Aplikasi E-Arsip	38
Gambar III.1 Pelayanan Surat Keterangan Asal	46
Gambar III.2 Operasi pasar	47
Gambar III.3 Pasar murah	47
Gambar III.4 Pemantauan harga bahan pokok dan bahan penting	48
Gambar III.5 Podcast	48
Gambar III.6 Misi dagang dengan eksportir	49
Gambar III.7 Workshop peningkatan citra ekspor	49
Gambar III.8 Sidang BPSK	50
Gambar III.9 Pengawasan barang beredar dan/atau jasa	50
Gambar III.10 Rakerda dekranasda	51
Gambar III.11 Fasilitasi penerapan GMP	59
Gambar III.12 Pelatihan pemasaran online	59
Gambar III.13 Hibah mesin/peralatan sarana produksi bidang sarana dan prasarana industri	59
Gambar III.14 Pelatihan kemasan	60
Gambar III.15 Revitalisasi griya batik	61
Gambar III.16 Rehabilitasi gedung produksi kemasan	61
Gambar III.17 Jelajah sentra IKM	62
Gambar III.18 Fasilitasi pameran skala ekspor (Pameran Inacraft)	62
Gambar III.19 Pameran Jogja Fashion Week	62
Gambar III.20 Misi dagang belgia	63
Gambar III.21 Bimtek/ pelatihan olahan tembakau	64
Gambar III.22 Pelatihan pengelola dan operator UPT CFMSI kulit Manding	64
Gambar III.23 Pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk	65
Gambar III.24 Pameran ILF	65
Gambar III.25 Revitalisasi sentra IKM	66
Gambar III.26 Pengawasan terhadap perizinan berusaha industri	66
Gambar III.27 Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	67
Gambar III.28 Layanan Servis Keliling (SIKELING)	68
Gambar III.29 Menu PKKI pada aplikasi Sengguh	74
Gambar III.30 Capaian PKKI Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY triwulan IV tahun 2024	75

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM,*
5. *Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

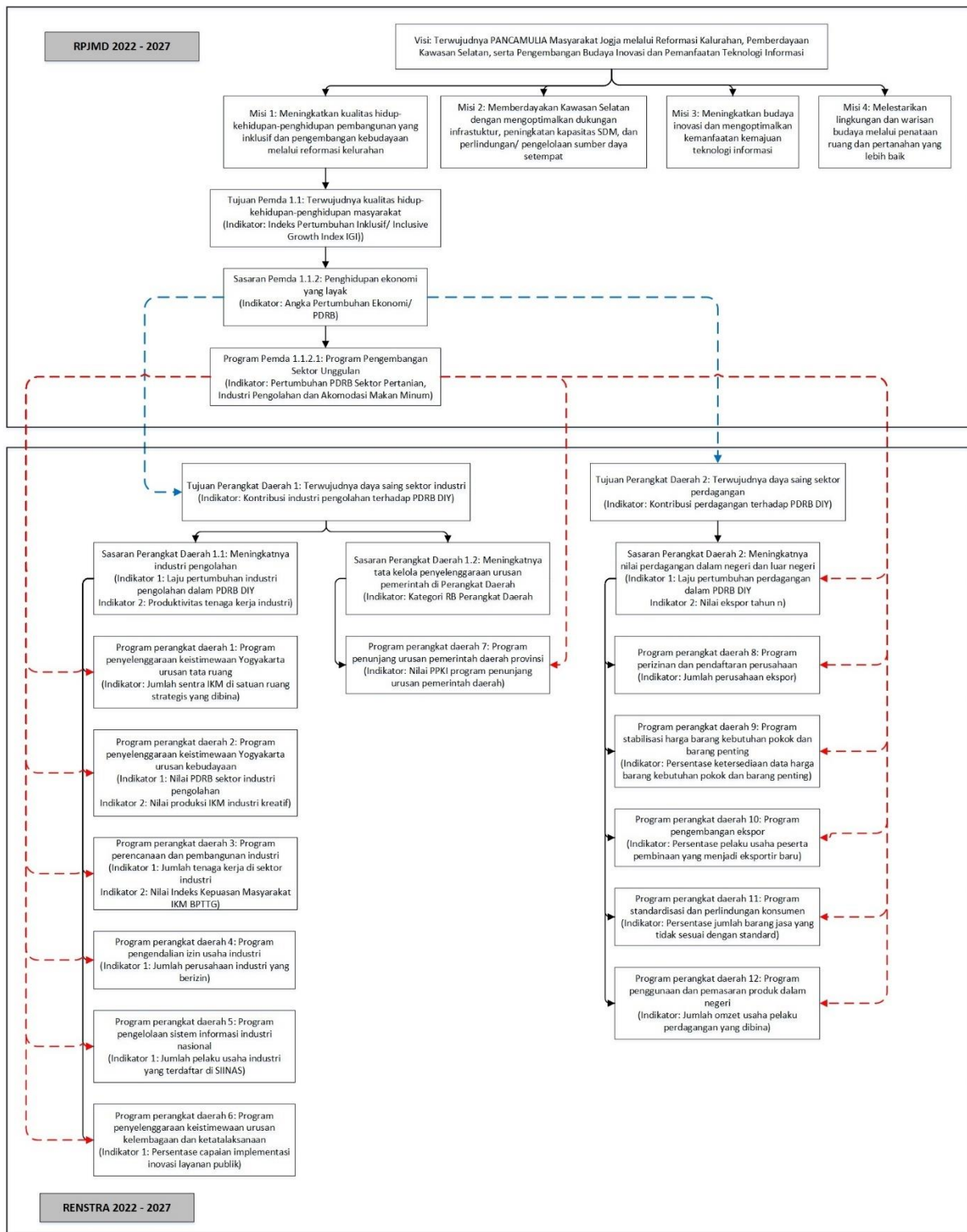
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

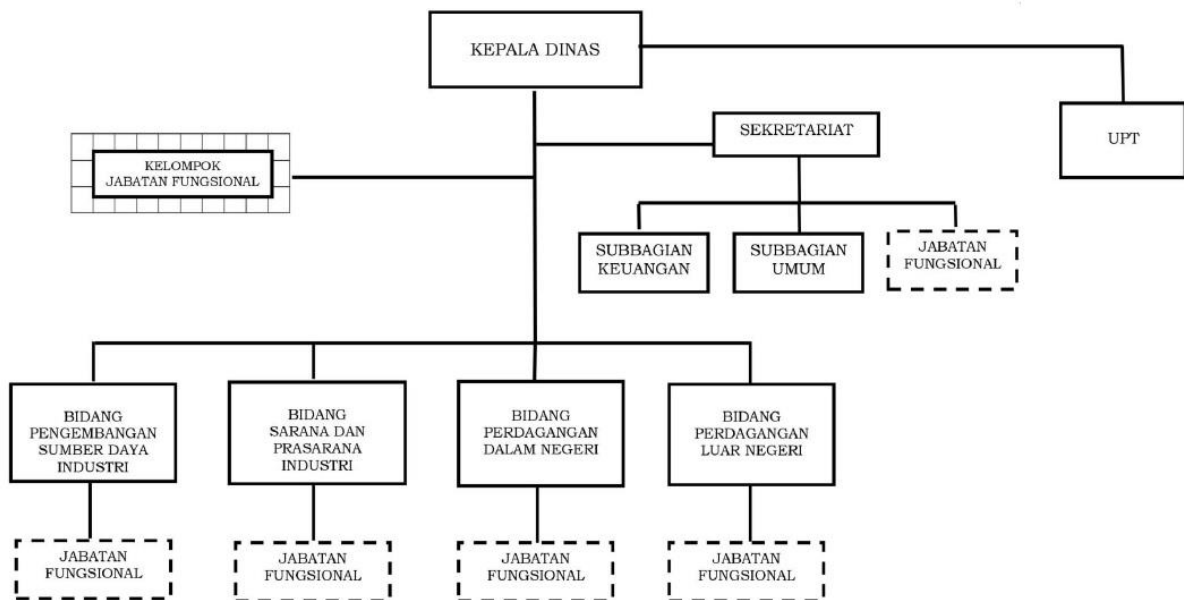
1.1. *Cascading* Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Sumber: RPJMD 2022-2027, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2022-2027

Gambar I.1 Cascading kinerja



Sumber: Lampiran Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Gambar I.2 Struktur organisasi

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Adapun fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai berikut

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
3. pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
4. peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
5. peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
6. fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
7. pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
8. pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
9. fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan infrastruktur industri;
10. fasilitasi sarana dan prasarana industri;
11. pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
12. penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya;
13. fasilitasi rekayasa dan produksi alat tepat guna, layanan perbengkelan, konsultasi teknis dan informasi rekayasa alat tepat guna;

14. fasilitasi kemasan dan produk kulit;
15. pengawasan distribusi bahan berbahaya;
16. penerbitan Surat Keterangan Asal dan Fasilitasi Angka Pengenal Impor;
17. pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
18. pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
19. fasilitasi pengembangan dan promosi dalam negeri dan luar negeri;
20. pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
21. koordinasi dan fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
22. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
23. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
24. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
25. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Dinas;
26. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota;
27. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
28. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan; dan
29. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 tahun 2022 dapat dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Dinas	1. Dibawah Sekretaris:
2. Sekretaris:	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
1) Kasubbag Keuangan	2) Analis Sistem Informasi
2) Kasubbag Umum	2. Dibawah Kasubbag Keuangan:
3. Kabid Pengembangan Sumber Daya Industri	1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Keuangan; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengelola Akuntansi; 5) Verifikator Data Laporan Keuangan
4. Kabid Sarana dan Prasarana Industri	3. Dibawah Kasubbag Umum
5. Kabid Perdagangan Dalam Negeri	1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Teknisi Sarana dan Prasarana; 6) Kustodian Barang Milik Negara; 7) Pengemudi
6. Kabid Perdagangan Luar Negeri	4. Dibawah Kabid Pengembangan Sumber Daya Industri:
7. Kabalai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	1) Pengadministrasi Umum
1) Kasubag Tata Usaha	2) Analis Pengembangan Usaha Agro Industri
2) Kasi Rekayasa dan Produksi	5. Dibawah Kabid Sarana dan Prasarana Industri:
3) Kasi Pengembangan dan Layanan Kemasan dan Produk Kulit	1) Pengadministrasi Umum
	2) Analis Industri
	6. Dibawah Kabid Perdagangan Dalam Negeri:
	1) Pengadministrasi Umum
	2) Analis Perdagangan
	3) Pengawas Barang Beredar dan Jasa
	4) Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
	7. Dibawah Kabid Perdagangan Luar Negeri: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perdagangan 3) Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri 8. Dibawah Kasubag Tata Usaha 1) Pengadministrasi Persuratan; 2) Pranata Kearsipan; 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Kustodian Barang Milik Negara; 6) Bendahara; 7) Pengadministrasi Keuangan; 8) Pengelola Gaji; 9) Pengelola Akuntansi; 10) Verifikator Data Laporan Keuangan; 11) Teknisi Sarana dan Prasarana 9. Dibawah Kasi Rekayasa dan Produksi 1) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna 2) Pengelola Produksi 10. Dibawah Kasi Pengembangan dan Layanan Kemasan dan Produk Kulit 1) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna 2) Pengelola Produksi

Gambar I.3. Tugas, fungsi dan peta jabatan pada organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”, antara lain sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan
 Angka kemiskinan di DIY yang masih tinggi, memerlukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Berkembangnya sektor perindustrian dan perdagangan akan berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, menumbuhkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan
2. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri
 Peningkatan volume produksi daerah lain dan masuknya produk-produk luar negeri ke pasar domestik akibat perdagangan bebas meningkatkan persaingan di

pasar dalam negeri. Oleh karenanya peningkatan daya saing pelaku usaha sektor perdagangan perlu ditingkatkan agar dapat memenangkan persaingan.

3. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri
Perdagangan bebas membuka peluang bagi semua negara untuk menjual produknya ke negara lain. Hal ini mendorong peningkatan produktivitas negara-negara tersebut. Untuk memenangkan persaingan tersebut daya saing pelaku usaha sektor perdagangan luar negeri DIY harus tinggi.
4. Pengembangan industri kreatif
Industri kreatif merupakan sektor yang dapat memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pelakunya. Tersedianya sumber daya manusia kreatif di DIY merupakan penunjang utama pengembangan sektor ini. Pemusatan industri yang memiliki potensi polusi tinggi di kawasan industri merupakan hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan industri di DIY.
5. Kekeringan panjang akibat El Nino yang berdampak pada produktivitas pertanian, seperti komoditas cabai, bawang merah, dan termasuk komoditas impor, seperti gula pasir. Selain itu, juga masih terbatasnya pasokan beras seiring mundurnya musim tanam yang berkontribusi pada peningkatan tingkat inflasi bahan pangan.
6. Penurunan permintaan produk ekspor akibat krisis ekonomi di Negara-negara tujuan ekspor utama (Amerika dan Eropa) dan kenaikan biaya logistik akibat perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina.
7. Berkembangnya ekonomi digital yang membuka peluang sekaligus memperketat persaingan bagi pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY
8. Berkembangnya implementasi ekonomi syariah dan ekonomi hijau.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perem
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1
B.	Jabatan Administrasi												

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perem
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
	1. Administrator	5	5				5	5				2	3
	2. Pengawas	2		2			2	1	1			1	1
	3. Pelaksana	66		45	11	10	24	1	12	2	9	12	12
C.	Jabatan Fungsional	40		35	5		20	12	12			15	5
	Jumlah	114	6	82	16	10	52	20	25	2	9	30	22

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 25 orang (21,93%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 20 orang (13,89%), D3 sebanyak 3 orang (1,39%), SLTA sebanyak 9 orang (6,25%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 62 orang, terdiri dari 42 orang pelaksana dan 20 pejabat fungsional. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai pelaksana pemerintahan di bidang industri dan perdagangan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
2	Tanah	11 unit	20.608.532.000
3	Peralatan dan Mesin	3.370 unit	47.183.827.959
4	Gedung dan Bangunan	28 unit	28.923.832.071
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15 unit	6.452.968.800
6	Aset Tetap Lainnya	193 unit	98.642.450
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2 unit	109.700.000
1	Aset Lainnya		
2	Aset Tidak Berwujud	9 unit	411.793.500
3	Aset Lain-lain	96 unit	694.446.000
	Jumlah		104.483.742.780

Sumber: Data Neraca Dinas Perindustrian dan Perdagangan 31 Desember 2024 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 11 (sebelas) unit kendaraan operasional, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, tempat parkir, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.400.000	315.400.000	35.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	280.400.000	315.400.000	35.000.000
			Jumlah Pendapatan	280.400.000	315.400.000	35.000.000
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	35.307.147.955	35.702.042.403	394.894.448
5	1	01	Belanja Pegawai	16.434.409.977	15.511.935.005	(922.474.972)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.867.572.978	19.184.942.398	1.317.369.420
5	1	05	Belanja Hibah	1.005.165.000	1.005.165.000	0
5	2		BELANJA MODAL	25.179.397.892	25.246.232.799	66.834.907
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.129.724.400	13.797.724.400	668.000.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.329.809.492	10.728.644.399	-601.165.093
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	217.430.000	217.430.000	0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.000	70.000	0
5	2	05	Belanja Modal Aset Lainnya	502.364.000	502.364.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Jumlah Belanja	60.486.545.847	60.948.275.202	461.729.355
	Total Surplus/(Defisit)	(60.206.145.847)	(60.632.875.202)	(426.729.355)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY semula Rp60.486.545.847 dan mengalami perubahan menjadi Rp60.948.275.202 atau tambah Rp461.729.355. Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan cerminan dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam bentuk Refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung layanan.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berikut ini adalah tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat DIY.

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;	Penerapan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan
2.	Meningkatkan koordinasi	Peningkatan koordinasi internal serta kolaborasi

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	Meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja, tidak hanya pada level output yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome secara lebih optimal	Peningkatan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja, tidak hanya pada level output yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome secara lebih optimal

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 -2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level tujuan Perangkat Daerah, sasaran strategis Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu tahun 2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Penghidupan Ekonomi yang Layak”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam waktu lima tahun dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2022-2027

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (Baseline 2022)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Terwujudnya daya saing sektor industri	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY	%	12,05	12,10	12,15.	12,20.	12,25	12,30	12,30
1	Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB DIY	%	0,99	n/a	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00
		Produktivitas tenaga kerja industri	Rupiah	33 juta/orang	34 juta/orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah		A	A	A	A	A	A	A
B.	Terwujudnya daya saing sektor perdagangan	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY	%	8,29	8,34	8,39	8,44	8,49	8,54	8,54
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB DIY	%	5,22	n/a	5,32	5,38	5,43	5,49	5,49
		Nilai ekspor tahunan	US\$	573 juta	630 juta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global	1. Meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk industri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik konvensional maupun online	Peningkatan penggunaan produk industri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
		Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi dan stabilisasi harga	Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga
		Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY	Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor
	2. Meningkatkan industri pengolahan	Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk
		Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sector)	Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sector)
		Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk Industri Kreatif	Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif
		Mengembangkan entrepreneurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan	Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	Koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM
		Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY
	3. Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan standarisasi	Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik
			Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2024 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global	1. Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	1.1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	9.999.700	9.999.700	0
		1.1.1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	9.999.700	9.999.700	0
		1.1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	9.999.700	9.999.700	0
		1.2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.160.999.800	1.852.606.000	691.606.200

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.2.1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.160.999.800	1.852.606.000	691.606.200
		1.2.1.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1.000.000	1.000.000	0
		1.2.1.2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	1.159.999.800	1.851.606.000	691.606.200
		1.3 Program Pengembangan Ekspor	172.999.400	172.999.400	0
		1.3.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	172.999.400	172.999.400	0
		1.3.1.1. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	76.999.650	76.999.650	0
		1.3.1.2. Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	999.950	999.950	0
		1.3.1.3. Peningkatan Citra Produk Ekspor	94.999.800	94.999.800	0
		1.4 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	175.399.762	175.399.762	0
		1.4.1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	174.399.762	174.399.762	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	174.399.762	174.399.762	0
		1.4.2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000	1.000.000	0
		1.4.2.1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1.000.000	1.000.000	0
		1.5 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	194.950.000	194.950.000	0
		1.5.1. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	194.950.000	194.950.000	0
		1.5.1.1. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	194.950.000	194.950.000	0
		Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	1.714.348.662	2.405.954.862	691.606.200
	2. Meningkatnya industri pengolahan	2.1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1.557.634.000	1.552.176.500	(5.457.500)
		2.2.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.557.634.000	1.552.176.500	(5.457.500)
		2.2.1.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.557.634.000	1.552.176.500	(5.457.500)
		2.2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	13.155.000.000	12.571.007.527	583.992.473

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		2.2.1 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4.805.000.000	4.223.766.307	581.233.693
		2.2.1.1 Pengadaan Sarana Prasarana	4.805.000.000	4.223.766.307	581.233.693
		2.1.1. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	8.350.000.000	8.347.241.220	2.758.780
		2.1.1.1. Pengembangan Industri Kreatif	8.350.000.000	8.347.241.220	2.758.780
		2.3 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	23.644.280.800	24.098.322.900	454.042.100
		2.2.1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	23.644.280.800	24.098.322.900	454.042.100
		2.2.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.000.000	21.000.000	20.000.000
		2.2.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	23.634.280.800	24.077.322.900	434.042.100
		2.4 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	20.000.000	14.506.000	(5.494.000)
		2.4.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	20.000.000	14.506.000	(5.494.000)
		2.4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan provinsi	10.000.000	4.506.000	(5.494.000)

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		2.4.1.2. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	10.000.000	10.000.000	0
		2.5 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.000.000	1.000.000	0
		2.5.1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.000.000	1.000.000	0
		2.5.1.1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.000.000	1.000.000	0
		2.6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	500.000.000	815.000.000	315.000.000
		2.6.1. Peningkatan Budaya Pemerintahan	500.000.000	815.000.000	315.000.000
		2.6.1.1. Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	500.000.000	815.000.000	315.000.000
		Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 2	38.877.914.800	39.052.012.927	1.342.083.073
3. Meningkatnya Tatakelola Penyelenggara	3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		18.011.295.277	17.154.820.305	(856.474.972)

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	aan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	3.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.218.600	96.218.600	66.000.000
		3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	0
		3.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.218.000	5.218.000	0
		3.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	0
		3.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.389.009.977	15.466.535.005	(922.474.972)
		3.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.345.369.977	15.422.895.005	(922.474.972)
		3.1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.640.000	41.640.000	0
		3.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	0
		3.1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000	1.000.000	0
		3.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.053.000	58.053.000	0
		3.1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58.053.000	58.053.000	0
		3.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.492.800	131.492.800	0
		3.1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	0
		3.1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		3.1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000	1.000.000	0
		3.1.4.4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	1.000.000	1.000.000	0
		3.1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.800	9.999.800	0
		3.1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.494.000	1.494.000	0
		3.1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.999.000	105.999.000	0
		3.1.4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	1.000.000	0
		3.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.100.000	2.100.000	0
		3.1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	1.000.000	0
		3.1.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	1.100.000	1.100.000	0
		3.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.138.127.400	1.138.127.400	0
		3.1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.599.400	345.599.400	0
		3.1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.528.000	792.528.000	0
		3.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.293.500	262.293.500	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		3.1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.090.000	33.090.000	0
		3.1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.407.500	214.407.500	0
		3.1.7.3. Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	0
		3.1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	996.000	996.000	0
		3.1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000	1.000.000	0
		3.1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.800.000	11.800.000	0
		Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 3	18.011.295.277	17.154.820.305	(856.474.972)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya daya saing sektor industri	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY	%	12,15	Triwulan I	11,78
					Triwulan II	11,97
					Triwulan III	11,98
					Triwulan IV	12,15

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	%	2,5	Triwulan I	2,5
					Triwulan II	2,5
					Triwulan III	2,5
					Triwulan IV	2,5
2.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	%	5,32	Triwulan I	4,50
					Triwulan II	4,56
					Triwulan III	4,82
					Triwulan IV	5,32
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)	Rp 23.644.280.800
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri (APBD)	Rp 20.000.000
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (APBD)	Rp 1.000.000
4.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (APBD)	Rp 9.999.700
5.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD)	Rp 1.160.999.800
6.	Program Pengembangan Ekspor (APBD)	Rp 172.999.400
7.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (APBD)	Rp 175.399.762
8.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)	Rp 194.950.000
9.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais)	Rp 1.557.634.000
10.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp 13.155.000.000
11.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dais)	Rp 500.000.000
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 18.011.295.277
	Jumlah Anggaran	Rp 58.603.558.739

2. Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/APBD)	Rp 299.999.358
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/APBD)	Rp 1.582.987.750
	Jumlah Anggaran	Rp 1.882.987.108

3. Mengelola anggaran dekonsentrasi :

- a. Program Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 105.577.000
- b. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 54.954.000

- c. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 69.840.000
- d. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Subkegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri Rp 699.868.000
- e. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Subkegiatan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi Rp 256.284.000
- f. Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 263.910.000

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya daya saing sektor industri	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY	%	12,15	Triwulan I	11,78
					Triwulan II	11,97
					Triwulan III	11,98
					Triwulan IV	12,15

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya industri	Laju pertumbuhan	%	2,5	Triwulan I	2,5
					Triwulan II	2,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
	pengolahan	Industri Pengolahan dalam PDRB			Triwulan III	2,5
					Triwulan IV	2,5
2.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	%	5,32	Triwulan I	4,50
					Triwulan II	4,56
					Triwulan III	4,82
					Triwulan IV	5,32
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A (91,55)	Triwulan I	A (91,55)
					Triwulan II	A (91,55)
					Triwulan III	A (91,55)
					Triwulan IV	A (91,55) *)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)	Rp 23.644.280.800
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri (APBD)	Rp 20.000.000
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (APBD)	Rp 1.000.000
4.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (APBD)	Rp 9.999.700
5.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD)	Rp 1.160.999.800
6.	Program Pengembangan Ekspor (APBD)	Rp 172.999.400
7.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (APBD)	Rp 175.399.762
8.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)	Rp 194.950.000
9.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais)	Rp 1.557.634.000
10.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp 13.155.000.000
11.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dais)	Rp 500.000.000

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 18.011.295.277
	Jumlah Anggaran	Rp 58.603.558.739

2. Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/APBD)	Rp 299.999.358
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/APBD)	Rp 1.582.987.750
	Jumlah Anggaran	Rp 1.882.987.108

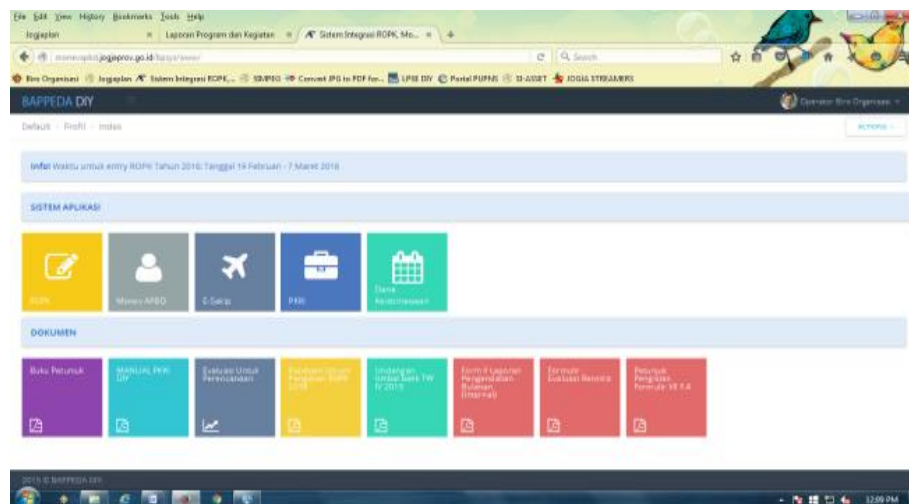
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi :

- a. Program Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 105.577.000
- b. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 54.954.000
- c. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 69.840.000
- d. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Industri Rp 699.868.000
- e. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Subkegiatan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi Rp 256.284.000
- f. Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 263.910.000

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Berikut ini beberapa instrumen pendukung dalam mencapai capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

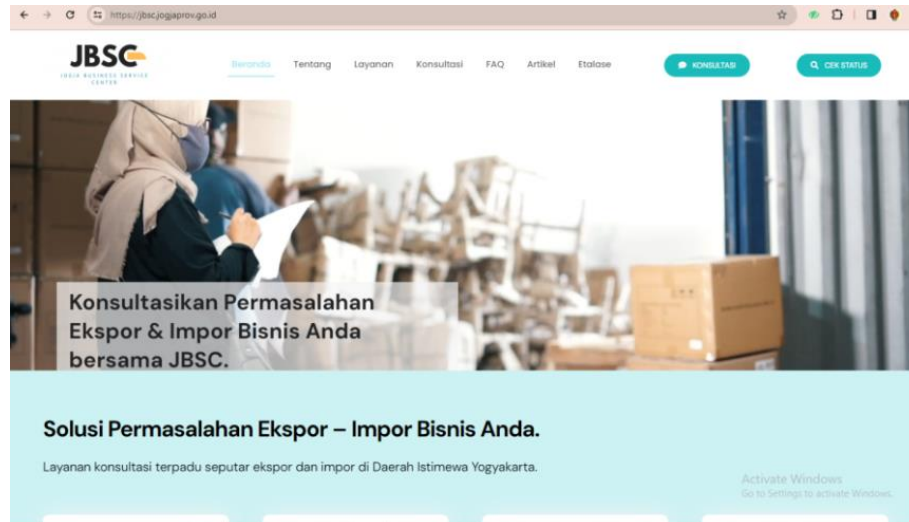
1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.



Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>

Gambar II.1. Sistem integrasi ROPK, monitoring dan evaluasi, E-SAKIP

2. Layanan konsultasi terpadu seputar ekspor dan impor di Daerah Istimewa Yogyakarta secara online. Layanan ini menggunakan aplikasi JBSC (Jogja Business Service Center). Aplikasi ini merupakan wadah yang memfasilitasi pelaku usaha di DIY untuk berkonsultasi mengenai permasalahan dan kendala terkait ekspor impor dan bisnis secara umum. Perwakilan dari berbagai instansi dilibatkan sebagai operator dan konsultan pada aplikasi ini.



Sumber: <https://jbsc.jogjaprov.go.id/>

Gambar II.2. Aplikasi JBSC

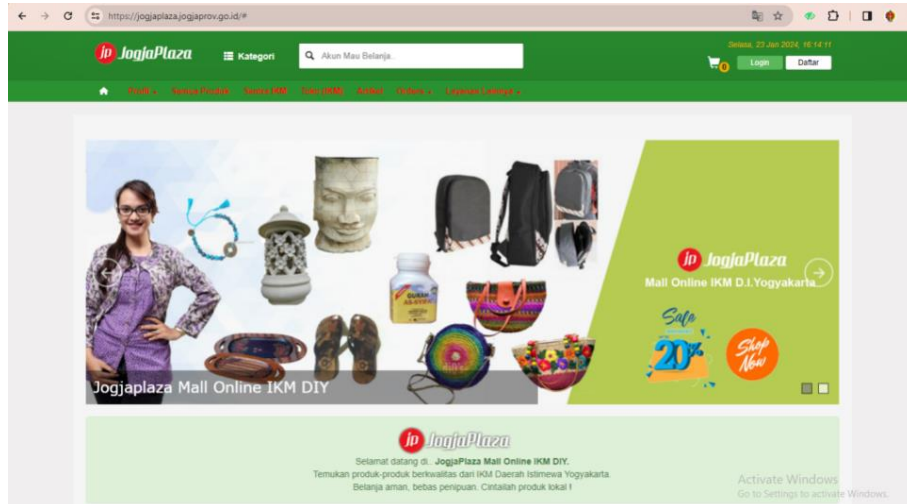
3. Aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER) merupakan layanan pengaduan konsumen secara online.



Sumber: <https://disperindag.jogjaprov.go.id/sikoncer/>

Gambar II.3. Aplikasi SIKONCER

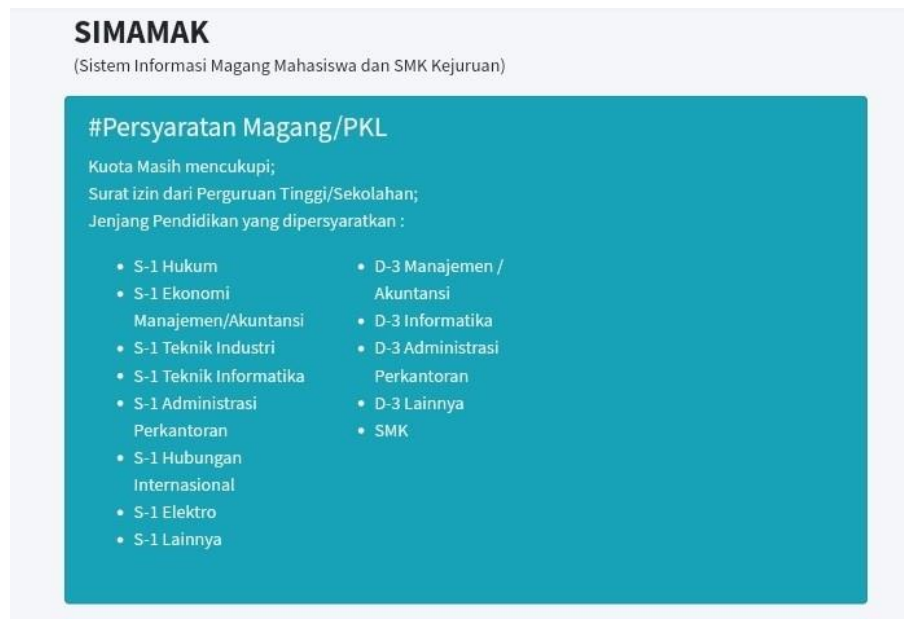
4. Aplikasi Jogjaplaza merupakan aplikasi mall online yang merupakan salah satu bentuk fasilitasi kepada pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas secara online. Aplikasi ini beralamatkan di <https://jogjaplaza.jogjaprov.go.id/>



Sumber: <https://jogjaplaza.jogjaprov.go.id/>

Gambar II.4. Aplikasi Jogjaplaza

5. Aplikasi SIMAMAK merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY untuk memberi kemudahan bagi mahasiswa atau siswa SMK kejuruan dalam mengajukan permohonan magang atau kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Aplikasi ini beralamatkan di <https://disperindag.jogjaprov.go.id/simamak/>



Sumber: <https://disperindag.jogjaprov.go.id/simamak/>

Gambar II.5. Aplikasi SIMAMAK

6. Aplikasi E-ARSIP merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mengelola arsip digital di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Aplikasi ini beralamatkan di <https://disperindag.jogjaprovo.go.id/e-arsip/index.php/login>.



Sumber: <https://disperindag.jogjaprovo.go.id/e-arsip/index.php/login>

Gambar II.6. Aplikasi E-ARSIP

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Base Line 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD/Renstra
						Target	Reali Sasi	Persen Tase	Kriteria/Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Terwujudnya daya saing sektor perdagangan	<u>Indikator:</u> Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY <u>Meta Indikator:</u> Distribusi PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (Sumber data BPS)	%	8,29	8,17	8,39	8,04	95,83	Sangat Baik	8,54
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	<u>Indikator:</u> Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB <u>Meta Indikator:</u> Pertumbuhan PDRB Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun n dibandingkan	%	5,22	4,29	5,32	3,94	74,06	Sedang	5,49

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Base Line 2022	Realis asi 2023	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD/ Renstra
						Target	Reali Sasi	Persen Tase	Kriteria/ Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dengan n-1 (Sumber data BPS)								
B	Terwujudnya daya saing sektor industri	<u>Indikator:</u> Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY <u>Meta Indikator:</u> Distribusi PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Sumber data BPS)	%	12,05	11,82	12,15	11,86	97,59	Sangat Baik	12,30
2	Meningkatnya industri pengolahan	<u>Indikator:</u> Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB <u>Meta Indikator:</u> Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun n dibandingkan dengan tahun n-1 (Sumber data BPS)	%	0,99	4,26	2,50	3,63	145,20	Sangat Baik	4,00
3	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Kategori RB Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian indeks RB tahun n dengan predikat Sangat Baik (A)	kategori	A (82,90)	A (91,50)	A (91,55)	A (95,47)	103,19	Sangat Baik	A

Adapun analisis capaian kinerja per tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah 1: Terwujudnya daya saing sektor perdagangan
Kinerja Tujuan Terwujudnya daya saing sektor perdagangan diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Tujuan 1

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya daya saing sektor perdagangan	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY	Distribusi PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (Sumber data BPS)

Sumber data diolah dari nilai distribusi PDRB sektor perdagangan terhadap PDRB DIY tahun 2024. Rincian data distribusi PDRB masing-masing sektor berdasarkan publikasi BPS sebagai berikut:

Tabel III.4 Distribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Tahun 2023	Distribusi PDRB Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10,23	10,00
2	Pertambangan dan Penggalian	0,44	0,45
3	Industri Pengolahan	11,82	11,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09
6	Konstruksi	9,43	9,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,17	8,04
8	Transportasi dan Pergudangan	5,62	5,85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,18	10,54
10	Informasi dan Komunikasi	10,06	9,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,25	4,25
12	Real Estat	6,60	6,45
13	Jasa Perusahaan	0,97	0,96
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,47	7,50
15	Jasa Pendidikan	8,39	8,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,20	3,22
17	Jasa Lainnya	2,93	2,90
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00

Kinerja tujuan Terwujudnya daya saing sektor perdagangan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan 1

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY <u>Meta Indikator:</u> Distribusi PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (Sumber data BPS)	8,17%	8,39%	8,04% (Sumber data BPS)	95,83% (Angka Realisasi/ Target Tahun 2024 x 100%)	8,54%	94,14% (Angka Realisasi/ Target Tahun 2027 x 100%)

Analisis ketercapaian tujuan Terwujudnya daya saing sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Dari target tahun 2024 sebesar 8,39%, kontribusi sektor perdagangan mencapai 8,04%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 95,83% dengan nilai kriteria sangat baik.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 8,17%, terdapat penurunan sebesar 0,13% dengan penurunan nilai PDRB sektor perdagangan sebesar 360.507 juta rupiah.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 94,14%.

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 1 (satu) sasaran strategis, yakni Meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

3.1.2. Sasaran 1: “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri”

Kinerja sasaran “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri” diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	Pertumbuhan PDRB Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun n dibandingkan dengan n-1 (Sumber data BPS)

Nilai indikator kinerja sasaran diperoleh dari nilai laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha/sektor dalam PDRB DIY tahun 2024 yang dipublikasikan oleh BPS DIY. Berikut ini data yang dipublikasikan oleh BPS DIY:

Tabel III.7 Laju Pertumbuhan Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Laju pertumbuhan Tahun 2023	Laju pertumbuhan Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,14	0,08
2	Pertambangan dan Penggalian	3,25	7,55
3	Industri Pengolahan	4,26	3,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,32	10,67
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,43	0,89

No	Lapangan Usaha	Laju pertumbuhan Tahun 2023	Laju pertumbuhan Tahun 2024
6	Konstruksi	4,81	8,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,29	3,94
8	Transportasi dan Pergudangan	10,27	6,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,72	8,46
10	Informasi dan Komunikasi	4,68	4,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,29	6,52
12	Real Estat	3,70	4,07
13	Jasa Perusahaan	8,28	5,35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,44	6,63
15	Jasa Pendidikan	4,38	4,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,32	5,32
17	Jasa Lainnya	6,97	3,31
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,07	5,03

Kinerja sasaran “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri” pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB <u>Meta Indikator:</u> Pertumbuhan PDRB Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun n dibandingkan dengan n-1 (Sumber data BPS)	4,29%	5,32%	3,94% (Sumber data BPS)	74,06 (Angka Realisasi/ Target Tahun 2024 x 100%)	5,49%	71,77%

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri” adalah sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB DIY tahun 2024 mencapai 3,94%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 74,06% (dibawah target). Pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,03% artinya PDRB DIY meningkat dari 118,63 Trilyun di 2023 menjadi 124,59 Trilyun rupiah di 2024. Kontribusi rata rata sektor perdagangan pada PDRB DIY di 2024 sebesar 8,04 % dari PDRB DIY. Sehingga PDRB sektor perdagangan mencapai angka

sebesar Rp9.519.851 Juta. Jika dibandingkan dengan PDRB sektor perdagangan tahun 2023 yang sebesar Rp.9.159.474 Juta maka terjadi laju pertumbuhan sebesar 3,94%.

- b. Dibandingkan PDRB DIY tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar Rp360.507 juta rupiah.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 74,06% atau dengan nilai sedang.

Walaupun masih dibawah target yang telah ditetapkan sebelumnya, capaian kinerja sasaran masih berada pada level sedang. Secara umum, keberhasilan capaian sasaran 1, dengan Indikator “Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB” tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.9 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Jumlah Perusahaan Ekspor	545 Perusahaan	565 Perusahaan	103,67%
	1.1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				
	1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90%	100%	111,11%
	2.1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				
	2.1.1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	2.1.2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100%
3. Program Pengembangan Ekspor		Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	20%	46,2%	231%
	3.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				
	3.1.1. Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	100%
	3.1.2. Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	100%
	3.1.3. Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 Produk	20 Produk	100%
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase Jumlah Barang Jasa yang Sesuai dengan Standard	96%	99,94%	104,1%
		Persentase penanganan sengketa konsumen	96%	100%	104,17%
	4.1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
	4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	40 Pengaduan	24 Pengaduan	60%
	4.2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
	4.2.1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta	1 Laporan	1 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	Rp 2,64 Milyar	Rp 3,19 Milyar	120,83%
	5.1. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				
	5.1.1. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5 UMKM	5 UMKM	100%

Capaian tersebut didukung dari :

- a. Capaian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator program “Jumlah perusahaan ekspor” dengan target 545 perusahaan, tercapai 565 perusahaan atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan melalui sub kegiatan pelayanan Surat Keterangan Asal.



Gambar III.1 Pelayanan Surat Keterangan Asal

- b. Capaian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Indikator program “Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” dengan target 90%, tercapai 100% atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diantaranya adalah dengan sub kegiatan berupa pemantauan harga bahan pokok dan bahan penting, operasi pasar serta pasar murah.



Gambar III.2 Operasi pasar



Gambar III.3 Pasar murah



Gambar III.4 Pemantauan harga bahan pokok dan bahan penting

- c. Capaian Program Pengembangan Ekspor yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Indikator “Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru” dengan target 20%, tercapai 46,2% atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Pengembangan Ekspor diantaranya Podcast, Misi dagang dengan eksportir, dan Workshop peningkatan citra ekspor



Gambar III.5 Podcast



Gambar III.6 Misi dagang dengan eksportir

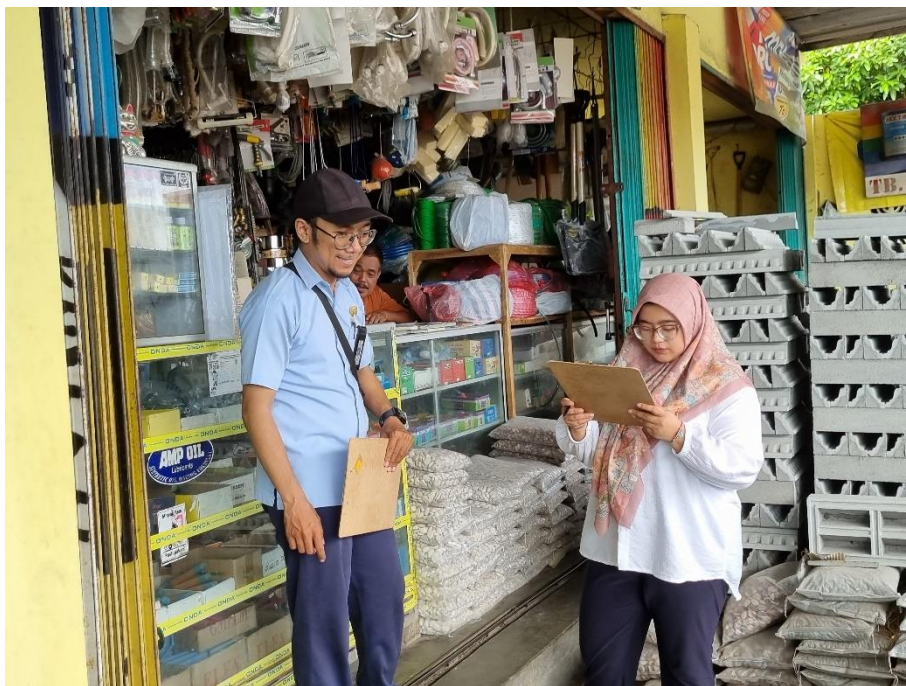


Gambar III.7 Workshop peningkatan citra ekspor

- d. Capaian Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Indikator “Persentase jumlah barang jasa yang sesuai dengan standard” dengan target 96%, tercapai 99,94% atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diantaranya adalah layanan pengaduan konsumen yang ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa.



Gambar III.8 Sidang BPSK



Gambar III.9 Pengawasan barang beredar dan/atau jasa

- e. Capaian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina” dengan target Rp 2,64 Milyar, tercapai Rp 3,19 Milyar atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri diantaranya adalah Rakerda Dekranasda.



Gambar III.10 Rakerda Dekranasda

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Banyaknya kegiatan untuk pengendalian inflasi seperti bazaar, pasar murah dan operasi pasar yang berdampak pada peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok yang dilakukan berbagai instansi
- b. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, termasuk sektor perdagangan.
- c. Adanya sinyal positif pada negara tujuan Utama ekspor DIY seperti pembukaan ekonomi Tiongkok.
- d. Terbukanya pasar ekspor ke India terutama untuk produk-produk tekstil, minyak atsiri, dan kerajinan.
- e. Produk unggulan DIY (Garment, furniture, sarung tangan, dan kerajinan) masih diminati pasar global
- f. Bertambahnya perjanjian Indonesia dgn negara mitra, sehingga preferensi tarif semakin banyak diantaranya:
 - o Indonesia - chile
 - o Indonesia - Uni Emirat Arab
 - o Indonesia - Mozambik
 - o Indonesia - australia
 - o Indonesia - Hongkong

- g. Pelaku usaha mampu memenuhi permintaan buyer baik kualitas dan standarisasi produk
- h. Aturan-aturan perdagangan yg mendukung ekspor dan impor, diantaranya:
 - o Permendag yg mengatur kemudahan impor bahan baku produk ekspor khususnya utk kawasan berikat
 - o Penggunaan CEISA 4.0 sehingga eksportir bisa melakukan ekspor secara online
 - o Diperbolehkannya ekspor secara perorangan (tidak harus badan usaha)

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Ekspor produk kayu ke negara tujuan utama ekspor DIY, terutama di Uni Eropa, terkendala oleh pemberlakuan regulasi anti deforestasi (Europe Union Deforestation Regulation/EUDR).
- b. Maraknya barang impor yang masuk ke Indonesia dengan harga murah.
- c. Penurunan permintaan ekspor tahun 2024 khususnya dari Amerika sebagai negara tujuan utama ekspor DIY disebabkan dampak resesi Amerika dengan menurunnya permintaan barang ekspor seperti pakaian jadi dan tekstil, dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi yang mendominasi ekspor DIY.
- d. Adanya perang Rusia-Ukraina sehingga terjadi kenaikan harga energi.
- e. Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yang terlalu ketat dari negara pengimpor.
- f. Belum adanya pelabuhan muat ekspor di DIY sehingga menghambat perdagangan. Sementara ini pengiriman barang ekspor diantaranya melalui pelabuhan Tanjung Emas.
- g. Menurunnya daya beli masyarakat baik Indonesia maupun di negara tujuan ekspor
- h. Mahalnya harga transportasi pengiriman/logistik terutama ke eropa Karena tidak bisa melewati laut merah

Rencana Tindak Lanjut

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- a. Membuka peluang ekspor ke negara tujuan baru seperti Afrika, Jepang, Australia, dan Timur Tengah, serta meningkatkan pemasaran domestik melalui optimalisasi penjualan daring.

- b. Pembinaan kepada pelaku usaha DIY untuk dapat memasarkan produknya melalui aplikasi daring. Pemanfaatan berbagai platform aplikasi daring dapat dioptimalkan mengingat maraknya trend konsumen menggunakan aplikasi untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan.
- c. Menjamin ketersediaan stok komoditas pokok penting serta kepastian harga yang tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Penyediaan data harga terkini dan informasi stok barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system*. Penyelenggaraan operasi pasar, bazar dan pasar murah dilaksanakan di berbagai tempat terutama mendekati hari besar keagamaan untuk menjamin ketersediaan stok dalam negeri.
- d. Meningkatkan kapasitas IKM dalam pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing.

3.1.3. Tujuan Perangkat Daerah 2: Terwujudnya daya saing sektor industri

Kinerja tujuan Terwujudnya daya saing sektor industri diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Tujuan 2

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya daya saing sektor industri	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY	Distribusi PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Sumber: BPS)

Sumber data diolah dari nilai distribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY tahun 2024.

Kinerja tujuan Terwujudnya daya saing sektor industri pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan 2

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontribusi industri pengolahan	11,82%	12,15 %	11,86% (Sumber data BPS)	97,59% (Angka Realisasi/	12,30%	96,10% (Angka Realisasi/

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	terhadap PDRB DIY <u>Meta Indikator:</u> Distribusi PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Sumber data BPS)				Target Tahun 2024 x 100%)		Target Tahun 2027 x 100%)

Analisis ketercapaian tujuan Terwujudnya daya saing sektor industri adalah sebagai berikut:

- d. Dari target tahun 2024 sebesar 8,39%, kontribusi sektor industri mencapai 11,86%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 97,59% dengan nilai kriteria sangat baik.
- e. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 11,82%, terdapat kenaikan sebesar 0,04% dengan kenaikan nilai PDRB sektor industri pengolahan sebesar 487.321 juta rupiah.
- f. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 96,10%.

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) sasaran strategis, yakni Meningkatnya industri pengolahan dan Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.

3.1.4. Sasaran 2: “Meningkatnya industri pengolahan”

Kiinerja sasaran “Meningkatnya industri pengolahan” diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun n dibandingkan dengan tahun n-1 (Sumber data BPS)

Kinerja sasaran “Meningkatnya industri pengolahan” pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB <u>Meta Indikator:</u> Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun n dibandingkan dengan tahun n-1 (Sumber data BPS)	4,26	2,50%	3,63% (Sumber data BPS)	145,2% (Angka Realisasi/ Target Tahun 2024 x 100%)	4,00%	90,75%

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: “Meningkatnya industri pengolahan” adalah sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun 2024 mencapai 3,63%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 145,20% (melebihi target). Pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,03% artinya PDRB DIY meningkat dari 118,63 Trilyun di 2023 menjadi 124,59 Trilyun rupiah di 2024. Kontribusi rata rata sektor industri pengolahan pada PDRB DIY di 2024 sebesar 11,86% dari PDRB DIY. Sehingga PDRB sektor industri pengolahan mencapai angka sebesar Rp13.929.575 Juta. Jika dibandingkan dengan PDRB sektor perdagangan tahun 2023 yang sebesar Rp.13.442.254 Juta maka terjadi laju pertumbuhan sebesar 3,63%.
- b. Dibandingkan PDRB DIY tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar Rp487.321 juta rupiah.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 90,75%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator “Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB” tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.14 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	1 Sentra	1 Sentra	100%
	1.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				
	1.1.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp 13,38 Triliun	Rp 14,87 Triliun	111,14%
	2..1 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				
	2..1.1 Pengadaan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	3 unit	3 unit	100%
	2.2. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				
	2.2.1. Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	6200 IKM	6200 IKM	100%
3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	413.500 Orang	373.480 Orang	90,32%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	84%	85%	101,19%
	3.1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				
	3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	16.543 Perusahaan	23.852 Perusahaan	144,18%
	4.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				
	4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	4.1.2. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA,	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	600 Perusahaan	2552 Perusahaan	425,33%
	5.1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
	5.1.1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	60%	60%	100%
	6.1. Peningkatan Budaya Pemerintahan				
	6.1.1. Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Capaian tersebut didukung dari:

- a. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina” dengan target 1 Sentra, tercapai 1 Sentra atau sesuai dengan target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang diantaranya Pelatihan Diversifikasi Produk, Pelatihan Kemasan, Fasilitasi MD, Fasilitasi Merk Kolektif, Fasilitasi Penerapan GMP, Hibah Mesin/Peralatan Sarana Produksi Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Pelatihan Pemasaran Online dan Fasilitasi Registrasi Marketplace Internasional.



Gambar III.11 Fasilitasi penerapan GMP



Gambar III.12 Pelatihan pemasaran online



Gambar III.13 Hibah mesin/peralatan sarana produksi bidang sarana dan prasarana industri



Gambar III.14 Pelatihan kemasan

- b. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Indikator “Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan” dengan target Rp 13,38 Triliun, tercapai Rp 14,87 Triliun atau melebihi target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan diantaranya Revitalisasi Griya Batik, Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan, Pemeliharaan Mesin Boiler Pengemasan Kaleng, Pengadaan Mesin Cetak, Layanan Kemasan, Pengembangan Sentra IKM DIY, Pengembangan Jogja Pusat Fashion Dunia, Jogja Fashion Week, Misi Dagang Belgia, Fasilitas pameran skala ekspor (IFEX, Inacraft, TEI, dan JIFFINA), Pelatihan Ekspor dan Business Matching di Sentra IKM, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap, Sosialisasi Manajemen Pemasaran Bagi Pelaku Usaha, Festival Batik, Jelajah Sentra IKM, Pendampingan TKDN, Pameran HUT Dekranas, Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Fasilitas Sertifikasi SVLK.



Gambar III.15 Revitalisasi griya batik



Gambar III.16 Rehabilitasi gedung produksi kemasan



Gambar III.17 Jelajah sentra IKM



Gambar III.18 Fasilitas pameran skala ekspor (Pameran Inacraft)



Gambar III.19 Pameran Jogja Fashion Week



Gambar III.20 Misi dagang Belgia

- c. Capaian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Indikator “Jumlah tenaga kerja di sektor industri” dengan target 413.500 orang, tercapai 373.480 orang atau tidak melampaui target tahun 2024. Untuk target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG, dengan target 84%, tercapai 85% atau melebihi target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri diantaranya Sosialisasi peningkatan pemanfaatan teknologi industri, Pelatihan Teknis Produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk, Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Sentra IKM, Pameran ILF, Pelatihan Prosedur dan Dokumentasi Perdagangan Luar Negeri,

Fasilitasi Sertifikasi Halal, Pendampingan TKDN, Revitalisasi Sentra IKM – PDIN, Podcast Peningkatan Kualitas Produk DIY dengan Teknologi Tepat Guna, Layanan Proses Bisnis Sentra Kulit UPT Manding, Pelatihan Pengelola dan Operator UPT CFSMI Kulit Manding, Temu Bisnis Pengembangan Potensi Kemitraan, dan Bimtek/ Pelatihan olahan tembakau.



Gambar III.21 Bimtek/ pelatihan olahan tembakau



Gambar III.22 Pelatihan pengelola dan operator UPT CFSMI kulit Manding



Gambar III.23 Pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk



Gambar III.24 Pameran ILF



Gambar III.25 Revitalisasi sentra IKM

- d. Capaian Program Pengendalian Izin Usaha Industri yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Indikator “Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin” dengan target 16.543 Perusahaan, tercapai 23.852 Perusahaan atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Pengendalian Izin Usaha Industri diantaranya Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian.



Gambar III.26 Pengawasan terhadap perizinan berusaha industri



Gambar III.27 Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian

- e. Capaian Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS” dengan target 600 perusahaan, tercapai 2.552 perusahaan atau melampaui target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diantaranya pemenuhan ATK dalam Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analiss Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- f. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Indikator “Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik” dengan target 60%, tercapai 60% atau sesuai dengan target tahun 2024. Aktivitas kegiatan yang mendukung ketercapaian Program Penyelenggaraan

Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan diantaranya layanan Servis Keliling (SIKELING).



Gambar III.28 Layanan Servis Keliling (SIKELING)

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Tumbuhnya permintaan produk ekspor barang industri pengolahan DIY. ekspor barang industri pengolahan periode Januari - Oktober meningkat dari US\$ 386,15 Juta tahun 2023 menjadi US\$ 435,71 Juta di tahun 2024. Komoditi utama: Pakaian Jadi bukan rajutan, Perabot penerangan rumah, Barang-barang rajutan dan Barang-barang dari kulit. Terjadi peningkatan permintaan produk ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN.
- b. Terbukanya pasar ekspor ke India terutama untuk produk-produk tekstil, minyak atsiri, dan kerajinan.
- c. Adanya Program-Program Pemerintah Pusat yang mendorong pertumbuhan sektor industri seperti Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri, Program TKDN IK gratis.
- d. Peningkatan impor bahan baku juga mengalami peningkatan dari tumbuh 56,41% (yoy) menjadi 62,44% (yoy) pada triwulan III 2024.
- e. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi yang ditandai dengan meningkatnya Impor barang modal (mesin dan peralatan lainnya) pada triwulan I 2024 tumbuh 252,65% hal ini tentu berdampak pada produksi TW IV.

- f. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, industri makanan, minuman, dan industri pakaian jadi.
- g. Penyelenggaraan pilkada yang berdampak pada permintaan produk industri pendukungnya.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Maraknya impor ilegal yang menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY. Menurut Menkopolkam Budi Gunawan, dalam 4 tahun terakhir total transaksi penyelundupan kurang lebih mencapai Rp 216 triliun (sumber CNBC Indonesia).
- b. Meningkatnya impor produk legal yang tentu saja akan menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY. Menurut asosiasi pengusaha, hal ini diantaranya disebabkan karena kemudahan impor akibat kebijakan pemerintah pusat tentang relaxsasi impor (Permendag no 8 tahun 2024). Impor produk tertentu yang semula harus dengan pertimbangan teknis kementerian perindustrian agar tidak mengganggu industri nasional, sekarang tidak harus dengan pertimbangan teknis tersebut.
- c. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut menyebabkan naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal ini menyebabkan mahalnya harga bahan baku impor. Imbasnya terhadap para pelaku usaha industri yang menggunakan bahan baku impor kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.
- d. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu) serentak Tahun 2024 berimbas pada dinamika industri MICE. Hal ini terlihat setidaknya dari tiga aspek, yakni perizinan, anggaran pengadaan acara berkurang, serta pihak swasta yang cenderung menahan diri pada tahun politik.
- e. Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yg terlalu ketat dari negara pengimpor seperti diberlakukannya EUDR di negara-negara Eropa.
- f. Mahalnya harga transportasi pengiriman terutama ke eropa karena tidak bisa melewati laut merah
- g. Pemanfaatan teknologi produksi yang masih perlu ditingkatkan

3.1.5. Sasaran 3: “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah”

Tolok ukur capaian sasaran “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah” sebagaimana indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Nilai Kategori Reformasi Birokrasi

Kinerja sasaran “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di perangkat daerah” pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.16 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> Nilai Kategori Reformasi Birokrasi	A (91,50)	A (91,55)	A (95,47)	103,19%	A	100%

Analisis Ketercapaian Sasaran 3: “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”

- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai nilai 95,47 dengan predikat Memuaskan (A), dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 103,19% (terlampau).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 91,50 dengan predikat Memuaskan (A) terdapat kenaikan nilai sebesar 104,34%.
- Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 100%.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator “Kategori RB Perangkat Daerah” tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.17 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	90,32	90,32%
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%
	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	124 Orang / Bulan	100%
	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100%
	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	13 Laporan	100%
	1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100%
	1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	1.4.4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	100%
	1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	1.4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	13 unit	100%
	1.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
	1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
	1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%
	1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	28 unit	100%
	1.7.3. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	3 unit	100%
	1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 unit	19 unit	100%
	1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%
	1.7.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 unit	19 unit	100%

Capaian tersebut didukung dari capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Dari Indikator “Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” dengan target skor 100 tercapai skor 90,32 atau tidak melampaui target skor tahun 2024. Instrumen pendukung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu aplikasi Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah) yang dapat diakses melalui <http://sengguh.jogjaprov.go.id>. Sengguh membantu melaksanakan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja (sasaran hingga sub kegiatan) organisasi perangkat daerah. Penilaian kinerja setiap sub kegiatan organisasi perangkat daerah terdapat pada menu PKKI.



Sumber: <http://senqguh.ioqjaprov.go.id>

Gambar III.29 Menu PKKI pada aplikasi Sengguh

8	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		90,32	Sangat Baik
8.1	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		95,00	Sangat Baik
8.2	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		93,60	Sangat Baik
8.3	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		91,80	Sangat Baik
8.4	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Umum	92,20	Sangat Baik
8.5	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Umum	87,20	Baik
8.6	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Umum	87,20	Baik
8.7	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Umum	87,20	Baik
8.8	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Umum	92,20	Sangat Baik
8.9	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Umum	92,20	Sangat Baik
8.10	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum	92,20	Sangat Baik
8.11	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Umum	92,20	Sangat Baik
8.12	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Umum	92,20	Sangat Baik
8.13	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Umum	92,20	Sangat Baik
8.14	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Umum	87,20	Baik
8.15	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Umum	92,20	Sangat Baik
8.16	3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Umum	92,20	Sangat Baik
8.17	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umum	87,20	Baik
8.18	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Umum	92,20	Sangat Baik
8.19	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Umum	92,20	Sangat Baik
8.20	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Umum	92,20	Sangat Baik

8.21	3.31.011.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Umum	88,87	Baik
8.22	3.31.011.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Umum	92,20	Sangat Baik
8.23	3.31.011.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Umum	87,20	Baik
8.24	3.31.011.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umum	87,20	Baik
8.25	3.31.011.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Umum	87,20	Baik
8.26	3.31.011.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Umum	92,20	Sangat Baik

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id> Dokumen PKKI Triwulan IV Tahun 2023

Gambar III.30 Capaian PKKI Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY triwulan IV tahun 2024

Faktor pendukung keberhasilan

- Adanya sarana prasarana teknologi pendukung seperti SIPD, Jogja Plan, Sengguh, E-Lapor, SIPPN, core reform space, Srikandi, dan Kenes
- Penilaian RB tahun 2024 dengan total nilai 95,47 dengan rincian penilaian RB general sebesar 84,07 dan RB tematik 11,40. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berkontribusi pada RB Tematik dengan nilai 11,40 untuk RB tematik pengentasan kemiskinan, tematik pengendalian inflasi, tematik peningkatan investasi, tematik penggunaan produk dalam negeri dan tematik digitalisasi administrasi pemerintahan (Stunting)
- Penilaian SAKIP AA untuk periode tahun 2024 dari Kemenpan RB.

Faktor penghambat keberhasilan

- Banyak ASN yang pensiun.
- Sarana prasarana pendukung (seperti komputer, laptop, kendaraan) belum sebanding dengan jumlah kegiatan.
- SIPD masih dalam tahap pengembangan sehingga masih sering terjadi error

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pergub DIY no 78 tahun 2023, Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berkontribusi terhadap Tujuan 1

Tanpa Kemiskinan dengan indikator Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Berikut ini kontribusi pada pencapaian sasaran TPB/SDGs sebagai berikut:

Tabel III.18 Kontribusi Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian TPB/SDGs Pemerintah Daerah

No	Tujuan SDGs	Indikator	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
1	Tanpa Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	10,16%	10,40% *)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90%	100%	111,11%
2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB	13%	11,86%	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	1 Sentra	1 Sentra	100%
		Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	4%	3,63%	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp 13,38 Triliun	Rp 14,87 Triliun	111,14%
		Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	14%	17,11%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	413.500 Orang	373.480 Orang	90,32%
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	16.543 Perusahaan	23.852 Perusahaan	144,18%

No	Tujuan SDGs	Indikator	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	600 Perusahaan	2552 Perusahaan	425,33%
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	60%	60%	100%
3	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020	Pertumbuhan ekspor produk nonmigas	539,96 s.d 769,72 juta USD	547,01 juta USD	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Perusahaan Ekspor	545 Perusahaan	565 Perusahaan	103,67%
Program Pengembangan Ekspor					Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	20%	46,2%	231%	

Penjelasan:

1. Tujuan Tanpa kemiskinan yang diukur dengan Indikator “Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur” dipengaruhi oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan indikator “Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” dengan realisasi sebesar 111,11% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Realisasi Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi dengan realisasi pelaksanaan pasar murah sebanyak 37 kali dan operasi pasar sebanyak 8 kali.
2. Tujuan Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun

2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang yang diukur dengan Indikator “Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB, Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur, dan Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur” dan dipengaruhi oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan realisasi sebesar 100%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan realisasi 111,14%, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan realisasi 90,32%, Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan realisasi 144,18%, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan realisasi 425,33%, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan realisasi 100%.

3. Tujuan Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020 yang diukur dengan Indikator “Pertumbuhan ekspor produk nonmigas” dan dipengaruhi oleh Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan realisasi sebesar 103,67% dan Program Pengembangan Ekspor dengan realisasi 231%.

3.2.2. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III.19 Kontribusi Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,1%	5,03%				

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
		(PDRB)						
					Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB DIY	5,32%	3,94%
					Meningkatnya Industri Pengolahan	Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB DIY	2,5%	3,63%
					Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A

Penjelasan:

1. Penghidupan ekonomi yang layak diukur menggunakan 4 (empat) indikator yaitu Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi.
2. Angka Pertumbuhan Ekonomi diantaranya sangat dipengaruhi nilai pertumbuhan PDRB sektor unggulan seperti sektor pertanian, industri pengolahan dan akomodasi makan minum. Sebagai salah satu sektor yang berpengaruh, pertumbuhan ekonomi industri pengolahan sangat dipengaruhi oleh nilai perdagangan (baik dalam negeri maupun luar negeri), nilai industri pengolahan, serta kualitas tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai perangkat daerah yang memiliki ketugasan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan memiliki peran dalam membina pelaku usaha industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan nilai perdagangan yang tergambarkan pada Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB DIY Tahun 2024, serta meningkatkan industri pengolahan yang

tergambarkan pada Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB DIY Tahun 2024.

4. Sebagai Perangkat Daerah mandiri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga diukur keberhasilan capaiannya melalui Sasaran “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah” dengan Indikator “Kategori RB Perangkat Daerah”.

Tabel III.20 Kontribusi Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
1	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum	3,1%	4,16%	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	1 Sentra	1 Sentra	100%
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp 13,38 Triliun	Rp 14,87 Triliun	111,14%
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	413.500 Orang	373.480 Orang	90,32%
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	16.543 Perusahaan	23.852 Perusahaan	144,18%
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	600 Perusahaan	2552 Perusahaan	425,33%
					Program Penyelenggaraan	Persentase capaian	60%	60%	100%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
					Program Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Implementasi inovasi layanan publik			
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Perusahaan Ekspor	545 Perusahaan	565 Perusahaan	103,67%
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90%	100%	111,11%
					Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	20%	46,2%	231%
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Sesuai dengan Standard	96%	99,94%	104,1%
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	Rp 2,64 Milyar	Rp 3,19 Milyar	120,83%
2	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Indeks SPBE	87,76 3,12	4,53	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah	100	90,32	90,32%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
					an Daerah Provinsi	h Daerah			

Penjelasan:

1. Pengembangan Sektor Unggulan yang diukur dengan Indikator “Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum”; dipengaruhi oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan indikator “Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina”, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator “Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan”, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Indikator “Jumlah tenaga kerja di sektor industri”, Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan indikator “Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin”; Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Indikator “Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS; Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan Indikator “Jumlah perusahaan ekspor”, Program Stabilisas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan Indikator “Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting”, Program Pengembangan Ekspor dengan Indikator “Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru”, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Indikator “Persentase jumlah barang jasa yang sesuai dengan standard”, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan Indikator “Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina”.
2. Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks SPBE, dipengaruhi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Indikator “Nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah”.

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Terwujudnya daya saing sektor perdagangan	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY	8,39%	8,04%	95,83				
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan perdagangan dalam PDRB	5,32%	3,94%	74,06	2.405.954.862	2.387.867.799	99,25	18.087.063
B	Terwujudnya daya saing sektor industri	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY	12,15%	11,86	97,59				
1	Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	2,50%	3,63%	145,20	39.052.012.927	37.058.111.731	94,89	1.993.901.196
2	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A (91,55)	A (95,47)	103,19	17.154.820.305	16.150.096.293	94,14	1.004.724.012
Jumlah						58.612.788.094	55.596.075.823		3.016.712.271
Total Belanja Operasional						58.612.788.094	55.596.075.823		3.016.712.271

Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Th 2024, Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Th 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk sasaran 1, sasaran 2 dan sasaran 3 melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional

program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp58.612.788.094; terealisasi Rp55.596.075.823 atau 94,85% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp3.016.712.271 atau 5,15% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Layanan konsultasi online melalui aplikasi Jogja Business Service Centre (JBSC)
- b. Layanan aduan konsumen secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER)
- c. Aplikasi SIMAMAK untuk memberi kemudahan bagi mahasiswa atau siswa SMK kejuruan dalam mengajukan permohonan magang atau kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
- d. SAVING-BATUBEKAS (Solusi Aman dan Efisien untuk Menyimpan Batu Gerinda Bekas dengan Mudah) pada Workshop Gamelan.
- e. Adanya SPG yang menjaga Pameran Tetap di Balemangu Kepatihan.
- f. Keikutsertaan Brand Fashion Designer dan Brand Produk Fashion dan turunannya di Jogja Fashion Week 2024.
- g. Pendaftaran peserta Sarasehan Sentra IKM melalui link google form.
- h. Sosialisasi SKA dilakukan melalui media online.
- i. Konsultasi dan Pendampingan Kepada Disperindag Kab Sleman terkait Peningkatan Layanan Ekspor dan Akurasi Data Ekspor.
- j. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting atau memperoleh data melalui link form.
- k. Pasar Murah merangkul Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Perbankan.

- l. Peningkatan intensitas koordinasi dengan ATASE Perdagangan Brussel.
- m. Inisiasi pemanfaatan hasil penelitian BRIN dan hasil penelitian mahasiswa untuk mendukung *evidence based policy* sektor industri dan perdagangan.
- n. Pembayaran honor Pengelola Keuangan secara non tunai.
- o. Pemanfaatan Alat Listrik yang Mendukung Penghematan Energi dan Efisiensi Anggaran Penyediaan Jasa Kelistrikan.
- p. Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang bisa diakses secara online.
- q. Modifikasi Mobil untuk memperlancar layanan Si Keling dan Kolaborasi Lintas Bidang Balai dalam Pelaksanaan Kegiatan SIKELING

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan di tengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel III.22 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Disperindag DIY	Ketua Harian Tim P3DN DIY, melakukan monitoring dan evaluasi implementasi P3DN di Pemda DIY	Pembinaan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara terintegrasi	1. OPD Pemda DIY 2. Pelaku Usaha Industri	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 2. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Industri Pengolahan 3. Mendukung pencapaian kinerja Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Pengembangan Industri Kreatif, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan tujuan Program P3DN 2. Mendapatkan pembinaan yang terintegrasi yang berdampak pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri di DIY
Sekda DIY, Asekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Memberikan pengarahan terkait implementasi P3DN di Pemda DIY					
Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Inspektorat DIY, Bappeda DIY, BPKA DIY, DPPM DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan BLP DIY	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi P3DN di Pemda DIY					
BPIWP2 Setda DIY, Dinas PUP ESDM DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan	Memberikan penafsiran apabila ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri					

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Pangan DIY, Dinas Perhubungan DIY				
		Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Konsultasi, Koordinasi			
		Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), KADIN DIY	Edukasi, pengawasan, memberikan penafsiran apabila ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri			
		Pelaku Usaha	Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menyediakan barang/jasa pada e-katalog lokal sebagai bahan pembinaan			
2.	Peningkatan Ekspor Impor DIY melalui Kolaborasi Lintas Sektor	Disperindag DIY	Melakukan pembinaan IKM Ekspor Impor DIY dari sisi peningkatan kualitas dan kuantitas produk, sertifikasi, fasilitasi promosi, penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan peningkatan kapasitas pelaku ekspor	Pembinaan ekspor secara terintegrasi	Pelaku Usaha Ekspor Impor	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Ekspor <p>Bagi Kelompok Sasaran: Mendapatkan pembinaan yang terintegrasi yang berdampak pada peningkatan usaha ekspor impornya</p>
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Melakukan pembinaan pelaku usaha pertanian dalam menyediakan bahan baku produksi produk ekspor dan menyediakan produk pertanian kualitas ekspor			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		DPPM	Pembinaan berkaitan dengan perijinan bagi pelaku usaha ekspor impor			
		Balai Karantina	Pembinaan berkaitan ekspor impor produk tanaman dan hewan			
		OPD Lainnya	Melakukan pembinaan terkait ekspor impor sesuai dengan kewenangannya			
		Pelaku Ekspor Impor	Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menjalankan usaha ekspor impor sebagai bahan pembinaan			
3.	Forum Komunikasi dan Konsultasi Ekspor Impor Daerah Istimewa Yogyakarta	Disperindag DIY	Admin dan konsultan permasalahan bisnis di bidang pemasaran, produksi, pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Layanan komunikasi dan Konsultasi	Pelaku Usaha di DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Ekspor, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Program Perencanaan dan Pembangunan Industri <p>Bagi Kelompok Sasaran: Peningkatan pengetahuan manajemen usaha</p>
		Bank Indonesia	Penyediaan Sarana dan prasarana			
		DPPM	Konsultan terkait perijinan			
		Bea Cukai	Konsultan terkait dengan kepabeanan			
		Balai Karantina	Konsultan terkait kekarantinaan produk ekspor impor berupa hewan dan tumbuhan			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Perbankan	Konsultasi bisnis terkait dengan transaksi keuangan			
		OPD Lainnya	Konsultan sesuai dengan kewenangannya			
		Pelaku Usaha DIY	Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menjalankan usaha bisnis sebagai bahan pembinaan			
4.	Pemantauan harga dan stok bahan pokok dan penting	Disperindag DIY	Koordinator, pengelola data, pemantau di 3 (tiga) pasar percontohan Kota Yogyakarta	Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting sebagai pendukung <i>Early Warning System</i> dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan stabilisasi harga	Masyarakat	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Perdagangan 2. Mendukung pencapaian program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitasnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat
		Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota	Memantau stok dan harga di pasar Kabupaten/Kota dan menyampaikan data hasil pantauan untuk diolah			
		DPPM	Menerbitkan perijinan			
		Pelaku Usaha di DIY	Memberikan umpan balik untuk perbaikan aplikasi OSS dan layanan penerbitan perijinan			
5.	Pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Disperindag DIY	Mensuplai harga dan stok barang pokok dan bahan penting lainnya	Rekomendasi kebijakan stabilisasi harga	1. Pemda DIY 2. Masyarakat	<p>Bagi OPD:</p> <p>Mendukung pencapaian target kinerja program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <p>Bagi Kelompok sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendapatkan rekomendasi kebijakan stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya 2. Terkendalinya harga dan stok barang pokok dan bahan penting lainnya
		Bank Indonesia, Biro Perekonomian, SKPD terkait, Bulog, BUMD	Merumuskan kebijakan terkait pengendalian inflasi			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
6.	Menekan lonjakan harga dan ketersediaan barang pokok dan bahan penting lainnya melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah	Disperindag DIY, Disperindag Kabupaten/Kota	Menyelenggarakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah	Stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok dan bahan penting lainnya	Masyarakat	<p>Bagi OPD: Mendukung pencapaian target kinerja program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <p>Bagi Kelompok sasaran: 1. Terkendalinya harga dan stok barang pokok dan bahan penting lainnya</p>
	Bank Indonesia	Memfasilitasi transportasi				
	TPID DIY	Memberi masukan komoditi yang akan dijual dalam Operasi Pasar dan Pasar Murah				
	Bulog, Distributor	Menyediakan bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya				
	Kepolisian setempat	Menjaga keamanan saat berlangsungnya kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah				
	Satgas Pangan Provinsi, Satgas Pangan Kabupaten/Kota	Mengawasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah				

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2023 dihadapkan pada hambatan dan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Ekspor produk kayu ke negara tujuan utama ekspor DIY, terutama di Uni Eropa, terkendala oleh pemberlakuan regulasi anti deforestasi (*Europe Union Deforestation Regulation/EUDR*).
 - b. Maraknya produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah.
 - c. Penurunan permintaan ekspor tahun 2024 khususnya dari Amerika sebagai negara tujuan utama ekspor DIY disebabkan dampak resesi Amerika dengan menurunnya permintaan barang ekspor seperti pakaian jadi dan tekstil, dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi yang mendominasi ekspor DIY.
 - d. Penerapan standarisasi produk maupun aturan barang masuk yang terlalu ketat dari negara pengimpor.
 - e. Belum adanya pelabuhan muat ekspor di DIY sehingga menghambat perdagangan. Sementara ini pengiriman barang ekspor diantaranya melalui pelabuhan Tanjung Emas.
 - f. Menurunnya daya beli masyarakat baik Indonesia maupun di negara tujuan ekspor.
 - g. Mahalnya harga transportasi pengiriman/logistik terutama ke eropa karena tidak bisa melewati laut merah.
 - h. Maraknya impor ilegal yang menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY. Menurut Menkopohukam Budi Gunawan, dalam 4 tahun terakhir total transaksi penyelundupan kurang lebih mencapai Rp 216 triliun (sumber CNBC Indonesia).
 - i. Meningkatnya impor produk legal yang tentu saja akan menjadi pesaing dan mematikan industri lokal termasuk di DIY.
 - j. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut menyebabkan naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal ini menyebabkan mahalnya harga

bahan baku impor. Imbasnya terhadap para pelaku usaha industri yang menggunakan bahan baku impor kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

- k. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu) serentak Tahun 2024 berimbas pada dinamika industri MICE. Hal ini terlihat setidaknya dari tiga aspek, yakni perizinan, anggaran pengadaan acara berkurang, serta pihak swasta yang cenderung menahan diri pada tahun politik.

- l. Pemanfaatan teknologi produksi yang masih perlu ditingkatkan

2. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2024 didukung faktor-faktor sebagai berikut ini.

- a. Banyaknya kegiatan untuk pengendalian inflasi seperti bazaar, pasar murah dan operasi pasar yang berdampak pada peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok yang dilakukan berbagai instansi
- b. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, termasuk sektor perdagangan.
- c. Adanya sinyal positif pada negara tujuan Utama ekspor DIY seperti pembukaan ekonomi Tiongkok.
- d. Terbukanya pasar ekspor ke India terutama untuk produk-produk tekstil, minyak atsiri, dan kerajinan.
- e. Produk unggulan DIY (Garment, furniture, sarung tangan, dan kerajinan) masih diminati pasar global
- f. Bertambahnya perjanjian Indonesia dgn negara mitra, sehingga preferensi tarif semakin banyak diantaranya:
 - o Indonesia - Chile
 - o Indonesia - Uni Emirat Arab
 - o Indonesia - Mozambik
 - o Indonesia - Australia
 - o Indonesia - Hongkong
- g. Pelaku usaha mampu memenuhi permintaan buyer baik kualitas dan standarisasi produk
- h. Aturan-aturan perdagangan yg mendukung ekspor dan impor, diantaranya:
 - o Permendag yg mengatur kemudahan impor bahan baku produk ekspor khususnya utk kawasan berikat
 - o Penggunaan CEISA 4.0 sehingga eksportir bisa melakukan ekspor secara online

- Diperbolehkannya ekspor secara perorangan (tidak harus badan usaha)
- i. Tumbuhnya permintaan produk ekspor barang industri pengolahan DIY. ekspor barang industri pengolahan periode Januari - Oktober meningkat dari US\$ 386,15 Juta tahun 2023 menjadi US\$ 435,71 Juta di tahun 2024. Komoditi utama: Pakaian Jadi bukan rajutan, Perabot penerangan rumah, Barang-barang rajutan dan Barang-barang dari kulit. Terjadi peningkatan permintaan produk ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan ASEAN.
- j. Adanya Program-Program Pemerintah Pusat yang mendorong pertumbuhan sektor industri seperti Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri, Program TKDN IK gratis.
- k. Peningkatan impor bahan baku juga mengalami peningkatan dari tumbuh 56,41% (yoy) menjadi 62,44% (yoy) pada triwulan III 2024.
- l. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi yang ditandai dengan meningkatnya Impor barang modal (mesin dan peralatan lainnya) pada triwulan I 2024 tumbuh 252,65% hal ini tentu berdampak pada produksi TW IV
- m. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY akan meningkatkan pula pendukung sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, industri makanan, minuman, dan industri pakaian jadi

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Membuka peluang ekspor ke negara tujuan baru seperti Afrika, Jepang, Australia, dan Timur Tengah, serta meningkatkan pemasaran domestik melalui optimalisasi penjualan daring.
2. Mendorong pemerintah pusat untuk mencegah dan mengurangi impor ilegal serta peningkatan daya saing produk local sehingga mampu bersaing di pasar.
3. Pembinaan kepada pelaku usaha DIY untuk dapat memasarkan produknya melalui aplikasi daring. Pemanfaatan berbagai platform aplikasi daring dapat dioptimalkan mengingat maraknya trend konsumen menggunakan aplikasi untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan.
4. Menjamin ketersediaan stok komoditas pokok penting serta kepastian harga yang tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Penyediaan data harga terkini dan informasi stok barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system*. Penyelenggaraan operasi pasar, bazar dan pasar murah dilaksanakan di

berbagai tempat terutama mendekati hari besar keagamaan untuk menjamin ketersediaan stok dalam negeri.

5. Meningkatkan kualitas produk industri lokal melalui diversifikasi, inovasi produk, standarisasi, dan sertifikasi agar dapat bersaing dengan produk pesaing. Peningkatan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pemanfaatan teknologi dapat didorong melalui program hibah peralatan bagi IKM.
6. Mendorong penyediaan dan penggunaan bahan baku lokal serta meningkatkan kemitraan dengan penyedia bahan baku dari provinsi lain.
7. Meningkatkan kapasitas IKM dalam pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya daya saing sektor industri	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY			12,05 %	12,10 %	12,15 %	12,20 %	12,25 %	12,30 %	12,30 %
			Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	0,99 %	n/a	2,50 %	3,00 %	3,50 %	4,00 %	4,00 %
				Produktivitas tenaga kerja industri	Rp. 33 Juta/Orang	Rp. 34 Juta/Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Perangkat Daerah								
2	Terwujudnya daya saing sektor Perdagangan	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY			8,29 %	8,34 %	8,39 %	8,44 %	8,49 %	8,54 %	8,54 %
			Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5,22 %	n/a	5,32 %	5,38 %	5,43 %	5,49 %	5,49 %
				Nilai Ekspor Tahunan	US\$ 573 Juta	US\$ 630 Juta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya daya saing sektor industri	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB DIY	%	12,15	Triwulan I	11,78
					Triwulan II	11,97
					Triwulan III	11,98
					Triwulan IV	12,15

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	%	2,5	Triwulan I	2,5
					Triwulan II	2,5
					Triwulan III	2,5
					Triwulan IV	2,5
2.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	%	5,32	Triwulan I	4,50
					Triwulan II	4,56
					Triwulan III	4,82
					Triwulan IV	5,32
3	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A (91,55)	Triwulan I	A (91,55)
					Triwulan II	A (91,55)
					Triwulan III	A (91,55)
					Triwulan IV	A (91,55) *

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)	Rp 23.644.280.800
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri (APBD)	Rp 20.000.000
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (APBD)	Rp 1.000.000
4.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (APBD)	Rp 9.999.700
5.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD)	Rp 1.160.999.800
6.	Program Pengembangan Ekspor (APBD)	Rp 172.999.400
7.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (APBD)	Rp 175.399.762
8.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)	Rp 194.950.000
9.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais)	Rp 1.557.634.000
10.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp 13.155.000.000
11.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dais)	Rp 500.000.000
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 18.011.295.277
	Jumlah Anggaran	Rp 58.603.558.739

2. Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/APBD)	Rp 299.999.358
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/APBD)	Rp 1.582.987.750
	Jumlah Anggaran	Rp 1.882.987.108

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.

4. Mengelola anggaran dekonsentrasi :

- Program Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 105.577.000
- Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 54.954.000
- Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 69.840.000
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Industri Rp 699.868.000
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Subkegiatan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi Rp 256.284.000
- Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 263.910.000

Yogyakarta, 18 Desember 2024


 PIHAK KEDUA
 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
 HAMENGKU BUWONO X


 PIHAK PERTAMA
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN DIY,
 YUNUS PANCAWATI S.E., M.Si.
 NIP. 196606041993032007

- f. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 053/III/INSP/2024 tanggal 22 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran 

- b. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu:
 - 1) Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
 - 2) Meningkatnya industri pengolahan; dan
 - 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di perangkat daerah.
- c. Meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja, tidak hanya pada level *output* yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* secara lebih optimal khususnya pada program sebagai berikut :
 - 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 3) Program Pengembangan Ekspor;
 - 4) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - 5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - 6) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
 - 7) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - 8) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memperoleh nilai 89,60.

Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur

karena...

karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.f
NIP. 19671004 199203 1 005

Tembusan:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Industri dan Perdagangan

Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 512063, Faximile 581335
 Website: disperindag.jogjaprov.go.id Kodepos 55166

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY

No	Saran/ Rekomendasi (Surat Inspektur DIY Nomor 700/445 tanggal 14 Maret 2024)	Tindak Lanjut
1	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan	Penerapan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan
2	Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja, tidak hanya pada level output yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome secara lebih optimal	Peningkatan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja, tidak hanya pada level output yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome secara lebih optimal

Yogyakarta, Mei 2024

KEPALA,

I. SYAM ARJAYANTI, M.P.A.

NIP. 19671204 199303 2 004



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**